

Berita : Setiap RW Dapat PIPPK Rp 200 Juta

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Tribun Jabar / Hal.5

Edisi : Kamis, 13 September 2018

Setiap RW Dapat PIPPK Rp 200 Juta

■ Rapor Warga Akan Dihapus

BANDUNG, TRIBUN - Wali Kota Bandung terpilih, Oded M. Danial, mengajukan kenaikan anggaran Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

"Anggaran yang naik hanya PIPPK RW yang semula Rp 100 juta dinaikan jadi Rp 200 juta per RW. Mudah-mudahan disetujui dewan. Anggaran ini sedang akan dibahas dengan dewan, apakah memungkinkan atau tidak," ujar Oded yang juga pelaksana tugas wali kota Bandung, di Pendopo Kota Bandung, Rabu (12/8).

Menurut Oded, dana PIPPK merupakan program unggulan Pemkot Bandung karena manfaatnya untuk masyarakat sangat dirasakan. Untuk pemanfaatan anggaran PIPPK ini, kata Oded, harus diusahakan agar bentuknya swadaya sehingga tidak menggunakan jasa pihak ketiga.

"Selama ini, anggaran PIPPK menggunakan jasa pihak ketiga sehingga tidak terasnuansa pemberdayaan kewilayahan," ujar Oded.

“Selama ini, anggaran PIPPK, menggunakan jasa pihak ketiga sehingga, tidak terasa nuansa pemberdayaan kewilayahan.”

ODED M DANIAL

Wali Kota Bandung Terpilih

Oded, yang kemarin untuk pertama kalinya memimpin rapat para camat, meminta camat agar meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat sehingga tahu permasalahan warganya.

"Camat dan lurah agar berkeliling, makan bareng, ngaliwet bersama warga sambil menampung aspirasi. Tugas camat dan lurah melayani dan melindungi warganya," ujar Oded.

Oded juga akan menghapus rapor untuk warga dan akan menggantinya dengan memberikan penghargaan bagi warga yang wilayahnya

bersih atau memiliki inovasi.

Camat Bandung Kidul, Evi Herdian, mengatakan, sistem penggunaan dan pencairan dana PIPPK harus diubah tidak menggunakan pihak ketiga agar anggaran tidak terpotong pihak ketiga.

Evi menyambut baik adanya kenaikan dana PIPPK dan berharap bisa terserap sehingga bisa dinikmati warganya.

Menurut Evi, penyerapan dana PIPPK tahun 2018 ini terganjal sistem informasi rencana anggaran (SURA). Untuk RW yang pengajuan anggaran tidak sesuai dengan sistem, anggaran tidak bisa dicairkan. Akibatnya, ada beberapa RW hanya bisa menggunakan dana PIPPK Rp18 juta. Untuk mengatasi agar anggaran PIPPK terserap, kata Evi, akan diperbaiki di anggaran perubahan.

Menanggapi permintaan harus silaturahmi dengan warga, Evi sudah melakukannya dengan salat Subuh berjamaah, salat Jumat, dan makan bareng warga prasejahtera. (tiah sm)